

Sistem bagi risiko dan bagi hasil Pengelolaan pertanian komoditas padi

Muhardi*

Abstrak

Penelitian sederhana ini ditujukan untuk mengetahui, (1) sistem pengelolaan pertanian komoditas padi ditinjau dari bagi risiko dan bagi hasil, (2) kemungkinan bagi hasil yang dapat diperoleh pemilik lahan dengan menggunakan sistem pengelolaan atau penggarapan lahan pertanian komoditas padi yang digunakan, (3) kemungkinan bagi hasil yang dapat diperoleh petani penggarap dengan menggunakan sistem pengelolaan lahan pertanian komoditas padi yang digunakan, dan (4) upaya yang dilakukan untuk memperoleh bagi hasil yang optimal baik bagi pemilik lahan maupun petani penggarap. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa, (1) terdapat dua alternatif sistem yang umumnya digunakan dalam pengelolaan komoditas padi, yaitu sistem sewa dan sistem maro. Sistem sewa dilihat dari pemilik lahan menunjukkan adanya bagi risiko yang relatif rendah, karena tidak menanggung beban biaya penggarapan yang dilakukan, dan bagi hasil panen sudah tetap. Sedangkan bagi petani penggarap, risiko yang ditanggung cukup memadai dilihat dari biaya penggarapan yang ditanggung dan hasil yang relatif tidak pasti tergantung kemampuan di dalam mengelola garapan lahan tersebut. Di sisi lain, sistem maro dilihat dari pemilik lahan maupun petani penggarap sama-sama menanggung risiko biaya penggarapan. Demikian pula dengan bagi hasil dari panen yang akan diperoleh, baik bagi pemilik lahan maupun petani penggarap sama-sama menanggung risiko ketidakpastian, (2) umumnya berbagai kemungkinan hasil panen per 1400 m² dapat dihasilkan dengan rentang minimal 4 kwintal gabah hingga maksimal dapat mencapai 9 kwintal. Selama hasil panen kurang dari 8 kwintal, maka akan memberikan bagi hasil yang lebih besar bagi pemilik lahan dengan menggunakan sistem sewa ketimbang sistem maro. Selanjutnya bagi hasil untuk pemilik lahan akan sama baik dengan menggunakan sistem sewa maupun sistem maro apabila dicapai hasil panen 8 kwintal. Akan tetapi pada saat hasil panen mencapai 9 kwintal, maka bagi hasil untuk pemilik lahan dengan sistem maro akan memberikan hasil yang lebih besar ketimbang dengan sistem sewa, (3) untuk petani penggarap, selama hasil panen kurang dari 8 kwintal, maka untuk petani penggarap akan memperoleh bagi hasil yang lebih besar dengan sistem maro ketimbang dengan sistem sewa. Sedangkan bagi hasil akan diperoleh sama untuk penggarap lahan, baik dengan sistem sewa maupun sistem maro apabila hasil panen dapat mencapai 8 kwintal per 1400 m². Namun demikian, pada saat hasil panen mencapai 9 kwintal maka sistem sewa akan dapat memberikan bagi hasil yang lebih besar bagi petani penggarap ketimbang dengan sistem maro, dan (4) bagi hasil optimal dapat dicapai tidak dominan ditentukan oleh sistem sewa ataupun sistem maro, akan tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan dalam penggarapan atau pengelolaan lahan dengan cara atau metode yang sebaik-baiknya, sehingga hasil panen dapat lebih banyak yang pada gilirannya akan diperoleh bagi hasil yang optimal baik bagi pemilik lahan maupun petani penggarap.

Kata kunci: Sistem bagi risiko, bagi hasil, pengelolaan pertanian komoditas padi

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat pedesaan.

*Penulis adalah Dosen Tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung

Padi merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting, selain juga terdapat berbagai macam komoditas pertanian lainnya yang berperan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat pedesaan. Dalam praktiknya, pengelolaan lahan pertanian komoditas padi dapat terjadi antara pihak pemilik lahan dengan pihak petani penggarap lahan tersebut. Kedua pihak ini dalam pengelolaannya memiliki sistem atau cara yang dapat saling menguntungkan satu sama lain. Di beberapa daerah pedesaan di Indonesia, sistem penggarapan lahan dapat menggunakan beberapa alternatif sistem.

Sistem penggarapan yang digunakan tentunya bertujuan untuk dapat memberikan hasil terbaik bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengelolaan atau penggarapan lahan pertanian akan mempengaruhi hasil yang diperoleh, dalam arti semakin baik penggarapan dilakukan, maka hasilnya juga akan semakin banyak. Demikian sebaliknya, semakin kurang baik penggarapan yang dilakukan, maka hasilnya juga akan semakin sedikit. Ini artinya, penggarapan yang baik merupakan kunci untuk memperoleh hasil yang baik. Lahan tanam yang luas tidak akan dapat memberikan hasil yang optimal, apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik. Dengan penjelasan lain, bahwa lahan yang sempit tentunya akan dapat memberikan hasil yang optimal, apabila pengelolaan atau penggarapannya dilakukan dengan sebaik-baiknya didukung oleh ilmu pengetahuan yang baik serta teknologi produksi pertanian yang juga lebih baik.

Dalam pengelolaan lahan pertanian, khususnya komoditas padi dapat dilakukan kerjasama antara pihak pemilik lahan dengan petani penggarap lahan tersebut. Sistem penggarapan apa yang digunakan akan tergantung pada kesepakatan atau kesepahaman diantara dua pihak. Dengan adanya kesepakatan diantara dua pihak tersebut, tentunya akan berpengaruh pada bagi hasil dan bagi risiko yang diperoleh dan ditanggung. Dapat dipahami, bahwa setiap alternatif sistem penggarapan berpengaruh pada adanya keuntungan yang layak kepada setiap pihak yang melakukan kerjasama tersebut. Oleh sebab itu tidak hanya bagi hasil yang perlu dipahami, tetapi juga bagi risiko yang akan ditanggung. Hasil yang diperoleh dengan alternatif sistem penggarapan secara dominan akan ditentukan oleh kemampuan petani dalam mengelola lahan pertaniannya. Namun demikian perlu dipahami bahwa setiap alternatif sistem memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Setiap alternatif sistem pengelolaan dapat dilakukan dan akan memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu berkaitan dengan uraian tersebut, penulis selanjutnya tertarik untuk melakukan suatu penelitian sederhana mengenai sistem bagi risiko dan bagi hasil pengelolaan pertanian komoditas padi. Untuk lebih memahaminya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil suatu kasus sederhana.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan pertanian komoditas padi ditinjau dari bagi risiko dan bagi hasil ?
2. Bagaimana kemungkinan bagi hasil yang dapat diperoleh pemilik lahan dengan menggunakan sistem pengelolaan atau penggarapan lahan pertanian komoditas padi yang digunakan ?
3. Bagaimana kemungkinan bagi hasil yang dapat diperoleh petani penggarap dengan menggunakan sistem pengelolaan lahan pertanian komoditas padi yang digunakan ?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memperoleh bagi hasil yang optimal baik bagi pemilik lahan maupun petani penggarap ?

2. Pembahasan

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini pemilik diartikan sebagai pihak yang memiliki lahan pertanian untuk komoditas padi yang tidak dikelola atau digarap sendiri. Sedangkan petani penggarap adalah pihak yang mengelola atau menggarap lahan pemilik tersebut. Tentunya pemilik lahan dapat berperan sebagai pihak yang menciptakan lapangan kerja bagi petani penggarap dalam upaya untuk menciptakan kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan yang lebih baik. Dalam kaitan ini Sumitro Djojohadikusumo (1994:208) menyatakan bahwa, suatu strategi pembangunan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja produktif (*employment oriented strategy*) pada dasarnya tidak bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Dalam hal ini pengembangan modernisasi perekonomian daerah pedesaan mengandung arti yang besar.

Pertanian yang dilakukan dewasa ini memperlihatkan adanya berbagai sistem pengelolaan lahan yang berbeda-beda. Dalam sejarah peradaban, pengelolaan terhadap kelangkaan pangan merupakan hasil pembaruan praktik atau sistem pertanian. Berbagai Negara memperlihatkan aneka ragam sistem pertanian yang ada bersama-sama, tergantung kepada tingkat perkembangan Negara masing-masing (Sicat dan Arndt, 1991:403).

Dalam kaitannya dengan sistem pengelolaan pertanian ini, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu cara (*a way*) (Haines, 2003:vi), yaitu suatu cara yang digunakan dalam pengelolaan lahan pertanian untuk komoditas padi. Suatu sistem pengelolaan atau penggarapan lahan pertanian komoditas padi ini akan menentukan bagi hasil dan bagi risiko yang akan diperoleh pihak pemilik lahan dan petani penggarap. Setiap alternatif sistem pengelolaan,

tentunya memiliki sisi manfaat dan risikonya. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan adalah bagaimana mengoptimalkan sisi keuntungan atau manfaatnya, dan meminimalkan sisi risikonya dari setiap alternatif sistem pengelolaan yang digunakan.

Sebuah daerah atau bahkan Negara dengan kondisi iklim yang cukup baik untuk pertanian cenderung berpenduduk banyak. Itulah sebabnya mengapa delta-delta yang luas di Cina dan India berpenduduk banyak, dan mengapa pulau Jawa di Indonesia dan beberapa bagian Luzon di Filipina berpenduduk sangat padat. Pertanian mungkin terbelakang dan produksi atau hasil panen mungkin hanya pas-pasan untuk hidup (subsisten), tetapi produktivitas lahan dapat memungkinkan untuk menopang jumlah penduduk yang besar (Sicat dan Arndt, 1991:401). Produktivitas lahan akan dapat ditentukan oleh kemampuan petani penggarap dalam mengelola lahan pertaniannya. Semakin produktif lahan yang digarap, maka hasil panen juga akan semakin banyak, demikian pula pengaruh eksponensialnya terhadap bagi hasil yang diperoleh baik bagi pemilik lahan maupun bagi petani penggarap.

2.2 Metodologi

Penelitian lapangan mengenai sistem bagi risiko dan bagi hasil pengelolaan lahan pertanian komoditas padi ini, dilakukan pada bulan Januari 2010. Penelitian ini dilakukan di Desa Gardusayang Kabupaten Subang. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa pemilik lahan dan petani penggarap. Selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik.

2.3 Hasil dan Analisis

Dalam pengelolaan pertanian komoditas padi di desa penelitian ini terdapat dua alternatif sistem yang umumnya digunakan, yaitu sistem sewa atau sistem maro. Kedua sistem tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut ini.

1. Sistem Sewa

Sistem sewa merupakan sistem yang dapat digunakan dalam kesepakatan penggarapan pertanian komoditas padi di desa penelitian ini. Sistem tersebut pada dasarnya menentukan bahwa, pihak pemilik yang memiliki lahan pertanian yang akan ditanami padi mengadakan kesepakatan kepada pihak petani penggarap, dengan ketentuan bahwa untuk setiap 1400 m² lahan tanam padi, pihak petani penggarap akan menanggung biaya penggarapan dari awal hingga panen rata-ratanya total biaya yang ditanggung senilai kurang lebih sama dengan 2 kwintal gabah. Dengan sistem ini pihak pemilik lahan tidak menanggung biaya penggarapan. Ketentuan lainnya yang disepakati dengan sistem ini adalah, pihak pemilik akan mendapatkan bagi hasil dari hasil

panen untuk setiap 1400 m² lahan tanam padi sebesar 3 kwintal gabah berapapun hasil panennya, kecuali kalau hasil panennya di bawah batas minimum, maka dapat terjadi kesepakatan lain yang pada dasarnya tidak akan merugikan baik bagi pihak pemilik maupun penggarap. Secara umum, untuk setiap 1400 m² lahan tanam padi ini, dapat diperoleh hasil minimum 4 kwintal dan maksimumnya 9 kwintal gabah. Di sisi lain, dengan sistem sewa ini bagi hasil untuk petani penggarap tidak ditentukan kuantitas ukurannya, atau jumlah bagi hasilnya tidak tentu yaitu akan tergantung pada perolehan hasil panen yang dicapai.

Dengan demikian, berbagai ketentuan melalui sistem sewa pada dasarnya dapat dinyatakan dalam tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1: Sistem Sewa

Keterangan	Sistem Sewa	
	Pemilik	Penggarap
Biaya-biaya	Tidak menanggung	Menanggung
Hasil	Tetap	Tidak tetap

Sistem sewa dilihat dari pemilik lahan menunjukkan adanya bagi risiko yang relatif rendah, karena tidak menanggung beban biaya penggarapan yang dilakukan, dan hasil panen sudah tetap (kecuali untuk kondisi tertentu yang dapat menimbulkan pertimbangan tertentu yang tidak merugikan). Sedangkan bagi petani penggarap, risiko yang ditanggung cukup memadai dilihat dari biaya penggarapan yang ditanggung dan hasil yang relatif tidak pasti tergantung kemampuan di dalam mengelola atau menggarap lahan tersebut.

2. Sistem Maro

Sistem maro merupakan sistem yang dapat digunakan dalam kesepakatan penggarapan pertanian komoditas padi di desa penelitian ini. Sistem ini pada dasarnya menentukan bahwa, pihak pemilik yang memiliki lahan pertanian yang akan ditanami padi mengadakan kesepakatan kepada pihak petani penggarap, dengan ketentuan bahwa untuk setiap 1400 m² lahan tanam padi, seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penggarapan dari awal persiapan hingga panen akan mengurangi bagi hasil dari jumlah panen yang diperoleh. Oleh karenanya baik pihak pemilik lahan maupun petani penggarap sama-sama menanggung biaya penggarapan. Sama halnya dengan sistem sewa, total biaya penggarapan rata-rata senilai kurang lebih sama dengan 2 kwintal gabah. Selain itu, dengan sistem ini hasil panen dibagi sama antara pemilik lahan dengan

petani penggarap. Baik pemilik lahan maupun petani penggarap akan memperoleh hasil panen yang sama-sama tidak tetap, yaitu tergantung pada hasil panen yang diperolehnya.

Dengan demikian, berbagai ketentuan melalui sistem maro tersebut dapat dinyatakan dalam tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2: Sistem Maro

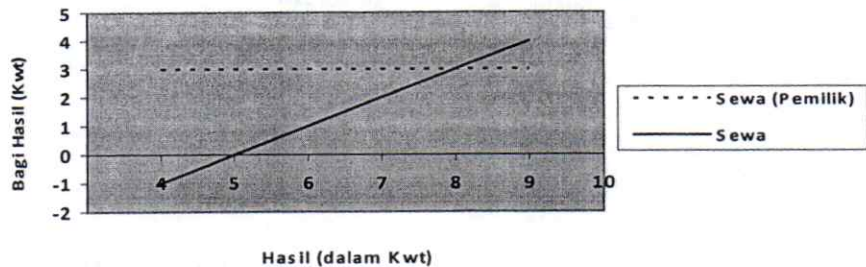
Keterangan	Sistem Maro	
	Pemilik	Penggarap
Biaya-biaya	Menanggung	Menanggung
Hasil	Tidak tetap	Tidak tetap

Sistem maro dilihat dari pemilik lahan maupun petani penggarap sama-sama menanggung risiko biaya penggarapan, yang umumnya ditentukan per 1400 m² adalah senilai rata-rata sama dengan 2 kwintal gabah yang akan mengurangi bagi hasil dari jumlah panen. Demikian pula dengan hasil panen yang akan diperoleh, baik bagi pemilik lahan maupun petani penggarap sama-sama menanggung risiko ketidakpastian, dalam arti hasil panen yang tidak tetap yaitu tergantung pada kemampuan di dalam mengelola lahan yang digarap. Bagi pemilik lahan, dengan sistem maro ini memerlukan pengawasan yang lebih tinggi karena hasil yang diperolehnya tidak pasti, ketimbang dengan sistem sewa di mana hasil yang akan diperoleh pemilik relatif pasti. Jadi sistem maro dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila tertanam nilai kepercayaan (*trust*) diantara pemilik lahan dan petani penggarap. Tentunya pihak petani penggarap dan pemilik harus juga mampu menunjukkan dan membangun nilai *trust* ini dengan sebaik-baiknya.

2.3 Analisis

Berikut ini penulis mendeskripsikan mengenai sistem sewa dalam pengelolaan lahan pertanian komoditas padi untuk berbagai kemungkinan bagi hasil yang dapat diperoleh pemilik lahan dan petani penggarap. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa untuk setiap 1400 m² lahan, kemungkinan hasil yang dapat diperoleh umumnya minimal 4 kwintal hingga maksimal 9 kwintal. Dengan sistem sewa ini, berapapun hasil panen yang diperoleh maka bagi hasil untuk pemilik lahan adalah tetap yaitu 3 kwintal per 1400 m² lahan. Apabila hasil panen sebanyak 4 kwintal, dan biaya yang harus ditanggung petani penggarap per 1400 m² lahan ini senilai sama dengan 2 kwintal gabah, maka bagi hasil untuk petani penggarap per 1400 m² lahan tersebut untuk hasil panen 4 kwintal ini adalah minus 1 kwintal, jadi petani penggarap menanggung rugi.

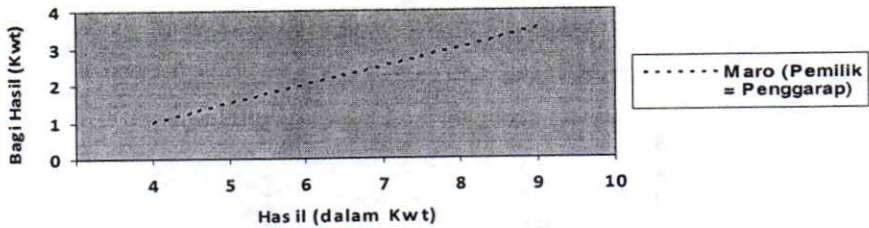
Selanjutnya apabila untuk 1400 m² lahan ini dihasilkan 5 kwintal hingga 9 kwintal gabah, maka akan dapat dinyatakan dalam grafik pada gambar 4.1 berikut ini.



Gambar 1: Bagi Hasil dengan Sistem Sewa

Dari gambar 1 diketahui bahwa, semakin banyak hasil panen per 1400 m² lahan ini, maka bagi hasil yang diperoleh petani penggarap semakin besar. Namun demikian bagi hasil untuk pemilik lahan berapapun hasil panen yaitu tetap memperoleh 3 kwintal. Bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap ini akan mencapai hasil yang sama, apabila per 1400 m² lahan dapat dihasilkan sebanyak 8 kwintal gabah. Jadi selama hasil panen kurang dari 8 kwintal petani penggarap akan memperoleh bagi hasil yang lebih kecil dari bagi hasil untuk pemilik lahan. Sebaliknya apabila hasil panen mencapai 9 kwintal per 1400 m² lahan, maka bagi hasil untuk petani peggarap lebih besar, yaitu mencapai 4 kwintal ketimbang bagi hasil untuk pemilik lahan sebanyak 3 kwintal.

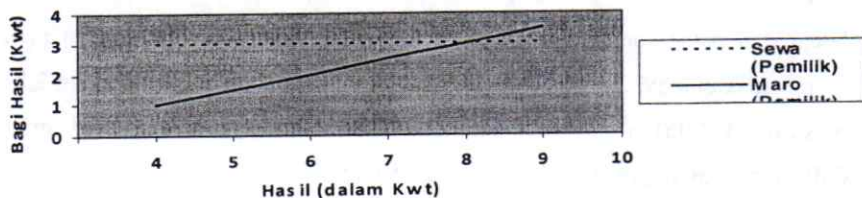
Berbeda dengan sistem maro dalam penggarapan lahan pertanian, pada sistem ini berapapun kemungkinan hasil panen, apabila digunakan anggapan per 1400 m² lahan minimal dihasilkan 4 kwintal dan maksimal dapat mencapai 9 kwintal, maka bagi hasil untuk pemilik lahan dan petani penggarap akan sama setelah dikurangi biaya-biaya penggarapan. Dengan menggunakan biaya penggarapan per 1400 m² lahan senilai sama dengan 2 kwintal hasil panen, maka untuk 1400 m² lahan dengan kemungkinan hasil panen 4 kwintal hingga 9 kwintal dapat dinyatakan dalam grafik pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2: Bagi Hasil dengan Sistem Maro

Dari gambar 2 diketahui bahwa, semakin banyak hasil panen per 1400 m² lahan ini, maka bagi hasil yang diperoleh pemilik lahan dan petani penggarap akan sama banyak. Dengan sistem ini, walaupun hasil panen hanya 4 kwintal, petani penggarap tidak akan menderita kerugian (bandingkan dengan sistem sewa). Grafik putus-putus dalam gambar 4,2 menunjukkan bagi hasil yang akan diperoleh pemilik lahan sekaligus juga menunjukkan bagi hasil yang diperoleh petani penggarap. Apabila dalam sistem sewa pemilik lahan tidak akan mendapatkan bagi hasil lebih dari 3 kwintal per 1400 m², maka dengan sistem maro ini pemilik lahan tersebut dapat memperoleh bagi hasil mencapai 3,5 kwintal apabila hasil panen mencapai 9 kwintal. Akan tetapi dengan sistem maro petani penggarap hanya akan mencapai 3,5 kwintal per 1400 m² (bandingkan dengan sistem sewa yang dapat mencapai bagi hasil untuk petani penggarap 4 kwintal per 1400 m² lahan).

Perbandingan antara sistem sewa dan sistem maro ditinjau dari bagi hasil untuk pemilik pada dasarnya akan memberikan hasil yang berbeda, sebagaimana terlihat pada gambar 4.3 berikut ini.

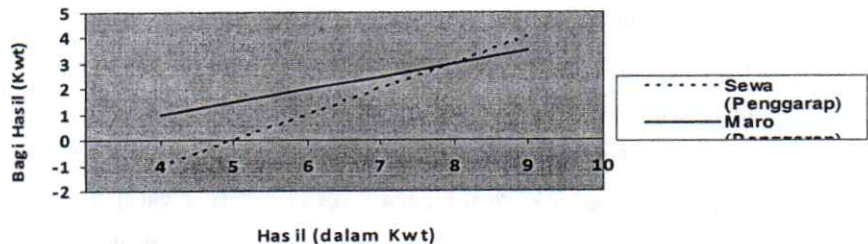


Gambar 3: Perbandingan Bagi Hasil untuk Pemilik Lahan antara Sistem Sewa dan Maro

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa, selama hasil panen dengan rentang dari 4 kwintal hingga kurang dari 8 kwintal, akan memberikan bagi hasil yang lebih besar bagi pemilik lahan

dengan sistem sewa ketimbang sistem maro. Selanjutnya bagi hasil untuk pemilik lahan akan sama baik dengan menggunakan sistem sewa maupun sistem maro apabila dicapai hasil panen 8 kwintal. Akan tetapi pada saat hasil panen melebihi 8 kwintal dalam analisis ini dimisalkan 9 kwintal, maka bagi hasil untuk pemilik lahan dengan sistem maro akan memberikan hasil yang lebih besar ketimbang dengan sistem sewa.

Perbandingan juga dapat dilakukan antara sistem sewa dan maro ditinjau dari bagi hasil untuk petani penggarap yang juga akan memberikan hasil yang berbeda, sebagaimana terlihat pada gambar 4.4 berikut ini.



Gambar 4: Perbandingan Bagi Hasil untuk Penggarap antara Sistem Sewa dan Maro

Dapat diketahui bahwa apabila hasil panen dari 4 kwintal hingga kurang dari 8 kwintal, maka untuk petani penggarap akan memperoleh bagi hasil yang lebih besar dengan sistem maro ketimbang dengan sistem sewa. Bagi hasil akan diperoleh sama untuk penggarap lahan, baik dengan sistem sewa maupun sistem maro apabila hasil panen dapat mencapai 8 kwintal per 1400 m². Namun demikian, sistem sewa akan dapat memberikan bagi hasil yang lebih besar bagi petani penggarap, ketimbang dengan sistem maro apabila dapat dicapai hasil panen lebih dari 8 kwintal atau dalam hal ini diilustrasikan 9 kwintal.

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua alternatif sistem yang umumnya digunakan dalam pengelolaan komoditas padi, yaitu sistem sewa dan sistem maro. Sistem sewa dilihat dari pemilik lahan menunjukkan adanya bagi risiko yang relatif rendah, karena tidak menanggung beban biaya penggarapan yang dilakukan, dan hasil panen sudah tetap (kecuali untuk kondisi tertentu yang dapat menimbulkan pertimbangan tertentu yang tidak merugikan pemilik

lahan maupun petani penggarap). Sedangkan bagi petani penggarap, risiko yang ditanggung cukup memadai dilihat dari biaya penggarapan yang ditanggung dan hasil yang relatif tidak pasti tergantung kemampuan di dalam mengelola garapan lahan tersebut. Di sisi lain, sistem maro dilihat dari pemilik lahan maupun petani penggarap sama-sama menanggung risiko biaya penggarapan, yang akan mengurangi hasil panen. Demikian pula dengan hasil panen yang akan diperoleh, baik bagi pemilik lahan maupun petani penggarap sama-sama menanggung risiko ketidakpastian, dalam arti hasil panen yang tidak tetap yaitu tergantung pada kemampuan di dalam mengelola lahan yang digarap. Sistem maro dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila tertanam nilai kepercayaan (*trust*) diantara pemilik lahan dan petani penggarap. Tentunya pihak petani penggarap dan pemilik harus juga mampu menunjukkan dan membangun nilai *trust* ini dengan sebaik-baiknya.

2. Umumnya berbagai kemungkinan hasil panen per 1400 m² dapat dihasilkan dengan rentang minimal 4 kwintal hingga maksimal dapat mencapai 9 kwintal gabah. Selama hasil panen kurang dari 8 kwintal, maka akan memberikan bagi hasil yang lebih besar bagi pemilik lahan dengan menggunakan sistem sewa ketimbang sistem maro. Selanjutnya bagi hasil untuk pemilik lahan akan sama baik dengan menggunakan sistem sewa maupun sistem maro apabila dicapai hasil panen 8 kwintal. Akan tetapi pada saat hasil panen mencapai 9 kwintal, maka bagi hasil untuk pemilik lahan dengan sistem maro akan memberikan hasil yang lebih besar ketimbang dengan sistem sewa.
3. Untuk petani penggarap, selama hasil panen kurang dari 8 kwintal, maka untuk petani penggarap akan memperoleh bagi hasil yang lebih besar dengan sistem maro ketimbang dengan sistem sewa. Sedangkan bagi hasil akan diperoleh sama untuk penggarap lahan, baik dengan sistem sewa maupun sistem maro apabila hasil panen dapat mencapai 8 kwintal per 1400 m². Namun demikian, pada saat sistem panen mencapai 9 kwintal maka sistem sewa akan dapat memberikan bagi hasil yang lebih besar bagi petani penggarap ketimbang dengan sistem maro.
4. Bagi hasil optimal dapat dicapai tidak ditentukan secara dominan oleh sistem sewa ataupun sistem maro, akan tetapi akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam penggarapan atau pengelolaan lahan dengan cara atau metode yang sebaik-baiknya, sehingga hasil panen menjadi lebih baik yang pada gilirannya akan diperoleh bagi hasil yang optimal baik bagi pemilik lahan maupun petani penggarap.

Daftar pustaka

- Haines, Stephen G. 2003. *The Manager's Pocket Guide To Systems Thinking and Learning*.
Mumbai: Jaico Publishing House 121, Mahatma Gandhi Road.
- Sicat, Gerardo P dan H.W.Arndt. 1991. *Ilmu Ekonomi, untuk Konteks Indonesia*. Penerjemah,
Nirwono. Jakarta: LP3ES.
- Sumitro Djojohadikusumo. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi
Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.